



MODEL TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI

Best Practice Tata Kelola Destinasi Pariwisata Perdesaan

**Ahmad Suprastiyo | Rupiarsieh | Musta'ana
Danar Mustaqim Ludan | Fida Nur Athiya**

MODEL TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI

Best Practice Tata Kelola Destinasi Pariwisata Perdesaan

**Ahmad Suprastiyo | Rupiarsieh | Musta'ana
Danar Mustaqim Ludan | Fida Nur Athiya**



MODEL TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI
***Best Practice* Tata Kelola Destinasi Pariwisata Pedesaan**

Tim Penulis:

**Ahmad Suprastiyo, Rupiarsieh, Musta'ana,
Danar Mustaqim Ludan, Fida Nur Athiyya**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-283-6

Cetakan Pertama:

September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan topik Model Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Pedesaan Di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu buku ini merupakan satu di antara luaran tambahan yang dijanjikan pada hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi skema Penelitian Fundamental Reguler (PFR) Berdasarkan nomor kontrak induk 128/C3/DT.05.00/PL/2025 dan nomor kontrak turunan 035/LL7/DT.05.00/PL/2025.

Pada bagian awal buku ini membahas konsep Administrasi Publik, bagian kedua membahas konsep *Governance*, bagian ketiga membahas Desa Wisata, bagian keempat membahas Model Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi serta pada bagian kelima Penutup.

Penulis berharap bahwa isi buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi Mahasiswa, Birokrasi maupun masyarakat secara umum tentang perkembangan konsep dan teori dalam tata kelola pengembangan Desa wisata edukasi. Penulis juga menyadari bahwa isi buku ini masih belum sempurna, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati sangat berharap adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dalam perbaikan isi buku, sehingga isi buku ini dapat memenuhi kelayakan akademik. Semoga buku ini bermanfaat terhadap khazanah keilmuan administrasi publik di era dewasa ini.

Bojonegoro, Agustus 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Konsep Administrasi Publik	1
B. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik	4
BAB 2 GOVERNANCE	13
A. Konsep Governance	13
B. Collaborative Governance	18
BAB 3 DESA WISATA	27
A. Konsep Desa Wisata	27
B. Komponen Desa Wisata	27
C. Komponen Sediaan Desa Wisata	32
D. Komponen Permintaan Desa Wisata	33
BAB 4 MODEL TATA KELOLA DALAM	
PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI	39
A. Pemerintah Desa	39
B. Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi	42
C. Model Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi	62
BAB 5 PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BIODATA PENULIS	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik	6
Tabel 2.1. Skala Kolaborasi	21
Tabel 2.2. Dimensi Kinerja CGR's	25
Tabel 3.1. Komponen Desa Wisata	35
Tabel 3.2. Komponen dan Sub Komponen Desa Wisata	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik	11
Gambar 2.1. Model Collaborasi Governance Anshell and Gash	20
Gambar 2.2. Kerangka Kerja Integrative Untuk Collaborative Governance	24
Gambar 2.3. Transformasi Proses Collaborative Governance	25
Gambar 4.1. Model Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi	68

BAB 1

ADMINISTRASI PUBLIK

A. KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK

Salah satu asumsi dasar dalam mengkaji administrasi publik merupakan "*administration is a unitary process that can be studied uniformly, at the municipal administration, state administration, and federal administration*". Asumsi dasar ini ditulis oleh White (1926) dalam artikelnya yang bertajuk "*Introduction to the Study of Public Administration*" begitu juga disunting oleh Shafritz, et.al (2004). Arti yang tercantum dalam anggapan dasar itu adalah bahwa mempelajari disiplin ilmu administrasi publik berarti menelaah administrasi publik sebagai satu kesatuan cara, tidak hanya pada kadar federal serta kadar negeri namun pula menyangkut administrasi pada kadar lokal(misalnya municipal).

Dalam pemikiran Shafritz & Russel (1999) dalam bukunya "*Introducing Public Administration*" bahwa memahami administrasi publik (public administration) tidak dapat cuma lewat satu arti saja, sebab tiap-tiap peminat administrasi publik memiliki perspektif yang berbeda alhasil menyimpulkan definisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, Shafritz & Russel (1999) mengembangkan pemahaman terhadap administrasi publik dalam empat kategorisasi atau perspektif yang mencakup: (1) *political perspective*, (2) *sah perspective*, (3) *managerial perspective*, serta (4) *occupational perspective*.

Klasifikasi arti administrasi public yang dapat dipahami dalam empat perspektif ialah: awal, dari perspektif politik melihat administrasi publik sebagai "*what government does*" baik langsung maupun tidak langsung, suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan public, implementasi kepentingan *public*, dan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara beramai- ramai sebab tidak bisa digarap dengan cara perseorangan. Kedua, perspektif legal (hukum), administrasi publik dipandang selaku penerapan hukum (*law in action*), regulasi, kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa ataupun "*raja*" kepada rakyatnya (King' s Largesse), dan sebagai wujud "*theft*" ialah aksi mengutip beberapa harta orang banyak buat dibagikan ke yang miskin dengan cara sah

BAB 2

GOVERNANCE

A. KONSEP GOVERNANCE

Buah pikiran *governance* lahir selaku respon dari gagasan kandas managerialism terkini (Saint-Martin, H., Hernández-Cobos, J., Bernal-Uruchurtu, M. I., Ortega-Blake, I., & Berendsen 2000), administrasi publik terkini (Andrisani, P.J., Hakim, S. And Savas, E.S. 2002) serta administrasi publik lama serta terkini (Bovaired & Loffler 2006) buat menciptakan kesamarataan sosial serta administrasi publik yang mengarah pada kebutuhan warga. Rancangan manajerialisme terkini dari (Saint-Martin, H., Hernández-Cobos, J., Bernal-Uruchurtu, M. I., Ortega-Blake, I., & Berendsen 2000) pada prinsipnya memperhitungkan kalau kemampuan zona publik bisa bertambah bila prinsip-prinsip administratif diaplikasikan selaku industri swasta. Banyak pegiat dari zona swasta dikonsultasikan dengan alibi mereka lebih handal dari administrator publik. Memakai konsultan serta konsepnya berikan legalitas pada strategi administratif, sebab mereka berawal dari zona swasta. Kerangka kegiatan manajemen publik yang terkini bagi (Andrisani, P.J., Hakim, S. And Savas, E.S. 2002), memiliki lebih banyak konsep aspek upaya yang diimplementasikan untuk mencapai keahlian sektor publik berlaku seperti industri swasta. Wujud manajemen publik lama untuk (Bovaired & Loffler 2006) pula termotivasi untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan aturan metode dari sektor swasta untuk keahlian dalam memberikan pelayanan.

Bertolak dari beberapa ketidakberhasilan yang dialami oleh konsep manajemen publik itu sampai memerlukan dirumuskan lagi paradigma yang bisa memenuhi kesamarataan sosial dan membidik pada masyarakat. Beberapa paradigma sesudah itu mencuat antara lain yang oleh (Denhardt, J.V. & Denhardt 2003) diucap dengan *New Public Service*, dalam kesusastaan Administrasi publik diketahui pula dengan paradigma *governance* (Denhardt, J.V. & Denhardt 2003), *public governance* (Bovaired & Loffler 2006) *adaptive governance* (Eakin, H. C., & Wehbe 2009), *collaborative governance* (Ansell, C., & Gash 2008), *dynamic governance* (Boon Siong Neo and Geraldine Chen

BAB 3

DESA WISATA

A. KONSEP DESA WISATA

Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat (Fandeli, Baiquni, Dewi, 2013) Begitu pun menurut Inskeep (2013) mendefinisikan wisata pedesaan yang di mana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan.

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata (Zakaria, 2014). Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

B. KOMPONEN DESA WISATA

Dalam pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu faktor pentingnya adalah keaslian dari desa setempat serta integrasi dari komponen pariwisata yang ada. Komponen untuk pengembangan desa wisata ini tidak jauh berbeda dengan komponen pariwisata. Pariwisata Perdesaan adalah

BAB 4

MODEL TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI

A. PEMERINTAH DESA

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, "*deca*", yang mengandung makna tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah wilayah tempat tinggal sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa mendasarkan keberadaannya pada prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
- e) Meningkatkan daya saing desa.

Kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa

BAB 5

PENUTUP

Model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata edukasi menerapkan proses kolaboratif antara pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, media massa, LSM, dunia usaha, dan masyarakat lokal (*hexa helix*). Proses kolaboratif dalam pengelolaan destinasi wisata edukasi didasarkan pada prinsip-prinsip dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Pengelolaan berbasis tata kelola kolaboratif memberikan perkembangan yang baik bagi destinasi wisata edukasi yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Proses kolaborasi dilakukan melalui pertemuan rutin, komunikasi yang intens antar *stakeholder*, membangun kepercayaan, transparansi dalam pengelolaan, adanya dasar hukum bagi tim pengelola desa wisata, tanggap dalam menyelesaikan masalah, membangun kesepahaman antar *stakeholder*, koordinasi dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada pengembangan destinasi wisata edukasi desa. Implikasi dari penelitian ini adalah pengembangan konsep kolaborasi dalam tata kelola destinasi wisata edukasi desa wisata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisani, P.J., Hakim, S. And Savas, E.S., 2002. The New Public Management :Lessons From Innovating Governors And Mayors, Kluwer, Massachusetts
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, 2007.
- Arnstein, S. R. 1969. A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Aris Zakaria, R. D. 2014. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan . JURNAL TEKNIK POMITS , 246-247.
- Astrayuda, Gumelar, S. 2010. Hand out mata kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. 2006. The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public administration review*, 66, 44-55.
- Brown, & Stange. 2015. Tourism Destination Management. Washington University.
- Bryson, John, M. 1999. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boon Siong Neo and Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance – Embedding Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.,.
- Bovaird, Tony dan Löffler, Elke (ed.). 2003. Public Management and Governance. London: Routledge
- Christie Mill, Robert, 2000, *Tourism The Internasional Bussines*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Cooper et.al. 2000. *Tourism Principles and Practice*. Harlow: Addison Wesley Longman Ltd.
- Cullen, F. T., Fisher, B. S., & Applegate, B. K. 2000. Public opinion about punishment and corrections. *Crime and justice*, 27, 1-79.
- Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. 2013. Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata jatiluwih tabanan bali. *Kawistara*, Vol 03 No 02 Hal 177-226.
- Dwight Waldo, 1963. *The Study of Public Administration*, Random House, New York
- Dwiyanto, A. dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*.
- Dwiyanto, A. 2011. *"Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif"* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eakin, H. C., & Wehbe, M. B. 2009. Linking local vulnerability to system sustainability in a resilience framework: two cases from Latin America. *Climatic change*, 93(3-4), 355-377.
- Eakin, H., Eriksen, S., Eikeland, P. O., & Øyen, C. 2011. Public sector reform and governance for adaptation: implications of new public management for adaptive capacity in Mexico and Norway. *Environmental management*, 47(3), 338-351.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. 2015. Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 717-747.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Frederickson, H. George. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Penerjemah: Al-Ghozei Usman. Jakarta: LP3ES.
- Frederickson, H. George & Jocelyn M. Johnston (Eds.). 1999. *Public Management Reform and Innovation: Research, Theory, and Application*. London: Alabama.
- Frederickson, H. George & Kevin B. Smith. 2003. *The Public Administration Theory Primer*. USA: Westview Press.
- Gunn, Clare A. 2002. *Tourism Planning*. New York City: Taylor and Francis.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Henry, N. 1975. *Public administration and:* London: -.Santoso (2019)
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning and Integrated Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Innes, J. E., & Booher, D. E. 2004. Reframing public participation: strategies for the 21st century. *Planning theory & practice*, 5(4), 419-436.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Islamy, M Irfan. 2002. "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik Di Era Otoda (Sebuah Outline), Makalah Yang Disajikan Pada Seminar Good Governance Pada Tanggal 27 April 2002 Di FIA-UB Malang." In.
- Junaid, I. 2016. Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata*, 10(01), 59–74.
- Kooiman, Jan (ed), 1993. *Modern Governance: New Government Society Interactions*, London: Sage Publications
- Nisjar, 1997
- Lynn Jr, L. E. (2006). *Public management: Old and new*. Routledge. (Bovaired & Loffler, 2009)
- Lynn Jr, L. E. 2006. *Public management: Old and new*. Routledge. (Bovaired & Loffler, 2009)
- Luna, Kruchten, Philippe, and Hermano Moura. 2015. "Agile Governance Theory : Conceptual Development," no. May.
- Luna, Alexandre J H De O, Philippe Kruchten, L G E Marcello, Humberto R De Almeida Neto, and Hermano P De Moura. 2014. "S TATE OF THE ART OF A GILE G OVERNANCE : A SYSTEMATIC REVIEW" 6 (5). <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Manahati, Zebua. 2016. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Edisi Revisi. Cetakan ke 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Martinez, Laia. 2011. *Governance network as collaborative platform for innovation in public sector*. RUC Oktober.
- Nicholas Henry, 1980 *Publik Administration and Publik Affair*, edisi kedua, Englewood Cliff, Prentice-Hall, Inc.

- O'Flynn, J., & Wanna, J. (Eds.). 2008. *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?*. ANU E Press.
- Osborne, S. P. 2010. The new public governance. *Emerging Perspectives on the theory and practice of public governance*, 1.
- Peters, B. G., & Pierre, J. 1998. Governance without government? Rethinking public administration. *Journal of public administration research and theory*, 8(2), 223-243.
- Pierre, J. (Ed.). 2000. *Debating governance: Authority, steering, and democracy*. OUP Oxford.
- Syafri, 2012
- Putra, Agus Muriawan. 2006. Konsep Desa Wisata. (Jurnal Manajemen Pariwisata Juni 2006. Volume 5, Nomor 1). Universitas Udayana.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Salemba Medika.
- Robert, Joan, 2004. *alliance coalitions and partnership :building collaborative organization*, New york : new society publisher
- Saint-Martin, H., Hernández-Cobos, J., Bernal-Uruchurtu, M. I., Ortega-Blake, I., & Berendsen, H. J. 2000. A mobile charge densities in harmonic oscillators (MCDHO) molecular model for numerical simulations: the water–water interaction. *The Journal of Chemical Physics*, 113(24), 10899-10912)
- Sammeng, A. M. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shafritz, Jay M & E.W. Russel. 1999. *Introducing Public Administration*. Second edition. New York: Longman.
- Shafritz, Jay M., et al. 2004. *Classics of Public Administration*. Fifth edition. USA: Thomson & Wadsworth.
- Shergold, P. 2008. Governing through collaboration. *Collaborative governance: A new era of public policy in Australia*, 13-22.
- Stoker, G., & Wilson, S. 2004. *British local government into the 21st century*. Palgrave Macmillan.
- Senge, P. M. 1996. *Leading learning organizations: The bold, the powerful, and the invisible*. Cambridge, MA: Center for Organizational Learning, Massachusetts Institute of Technology.
- Soemarno, 2010. *Bahan Kajian MK. Ekonomi Sumberdaya Alam*. PDIP PPS FPUB

- Sugiyama, A. G. 2011. *Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam*. Bandung: Guardaya Intimata.
- Taylor, W, W. 1923. *The Chemistry Of Colloids and Some Technical Applications*(Second Edition). London
- Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahab, S., & Pigram, J. J. 1997. *Tourism, Development and Growth*. London: Routledge.
- Waldo, Dwight 1953; *Fugsi Administrasi Negara*. Penerbit : Jembatan Yakarta
- Wanna, J. 2008. Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes. *Collaborative governance: a new era of public policy in Australia*, 3-12.
- White. Leonard D. 1995. *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Mac Milan.
- Willoughby, W.F, 1939 ; *Principle Of Public Administration*, The Hopkins University Press Baltimore. USA
- Wilson, James Q, 1989, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do it*, Basic Books, United States of America.
- Zaenuri, Muchammad. 2018. *Tata Kelola Pariwisata-Bencana berbais Collaborative Governance. Konsep Analisis dan Permodelan*. Eksplora:Yogyakarta.

BIODATA PENULIS

Dr. Ahmad Suprastiyo, S.Sos., M.Si.

Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang menekuni bidang kebijakan dan manajemen publik. Lahir di Bojonegoro, 27 April 1989. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro tahun 2012, menyelesaikan studi S2 pada Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra tahun 2014 dan menyelesaikan studi S3 Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2024. Selama menjalani karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro dan sekarang menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro. Penulis juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian yang dibiayai oleh Dikti dalam skema Penelitian Dosen Pemula (PDD), skema Penelitian Disertasi Doktor (PDD) dan skema Penelitian Fundamental Reguler (PFR).

Dr. Rupiarsieh, M.Si.

Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang menekuni bidang kajian gender dalam politik. Lahir di Salatiga, 5 Oktober 1961. Menyelesaikan pendidikan sarjana Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 1986, menyelesaikan studi S2 pada Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Gadjah Mada Tahun 1995, dan menyelesaikan studi S3 Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2007. Selama menjalani karier sebagai dosen pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro selama dua periode. Penulis juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian yang dibiayai oleh Dikti serta aktif dalam kajian gender dalam pemilu.

Musta'ana, S.Sos., M.Si.

Dosen pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang menekuni bidang pemberdayaan perempuan. Lahir di Bojonegoro, 24 Maret 1976. Menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, menyelesaikan studi S2 pada Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra. Penulis aktif melakukan pengabdian dan penelitian yang dibiayai oleh Dikti maupun Universitas.

Danar Mustaqim Ludan

Mahasiswa pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro. Penulis aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Jurnalistik (P2J) serta BEM KM FISIP Universitas Bojonegoro.

Fida Nur Athiyya

Mahasiswa pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro. Penulis aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kependudukan serta BEM KM FISIP Universitas Bojonegoro.

MODEL TATA KELOLA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI

Best Practice Tata Kelola Destinasi Pariwisata Perdesaan

Model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata edukasi menerapkan proses kolaboratif antara pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, media massa, LSM, dunia usaha, dan masyarakat lokal (hexa helix). Proses kolaboratif dalam pengelolaan destinasi wisata edukasi didasarkan pada prinsip-prinsip dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara. Pengelolaan berbasis tata kelola kolaboratif memberikan perkembangan yang baik bagi destinasi wisata edukasi yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Proses kolaborasi dilakukan melalui pertemuan rutin, komunikasi yang intens antar stakeholder, membangun kepercayaan, transparansi dalam pengelolaan, adanya dasar hukum bagi tim pengelola desa wisata, tanggap dalam menyelesaikan masalah, membangun kesepahaman antar stakeholder, koordinasi dalam berbagai kegiatan yang berdampak pada pengembangan destinasi wisata edukasi desa. Implikasi dari penelitian ini adalah pengembangan konsep kolaborasi dalam tata kelola destinasi wisata edukasi desa wisata di Indonesia.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

0815-7000-699

Pariwisata

ISBN 978-634-246-283-6



9

786342

462836